

DISKURSUS KEBIJAKAN KEPEMUDAANDALAM PERSPEKTIF BEHAVIORALISME DAN NEO-INSTITUSIONALISME (Pendahuluan Studi Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Cianjur)

Oleh:

Moch. Agung Lukmanul Hakim¹⁾, Cecep Darmawan²⁾, Leni Anggraeni³⁾

^{1,2,3}FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

¹Email: mochagung.lukmanulhakim@upi.edu

²Email: cecep darmawan@yahoo.com

³Email: l_anggraeni@upi.edu

Abstrak

Bahwa kesenjangan terbuka antara tujuan dari pelayanan kepemudaan dalam kerangka kebijakan kepemudaan dan pencapaian kebijakan dengan kualitas Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam kualifikasi rendah, di masa depan secara hipotetik akan menjadi masalah kepemudaan yang kompleks dan krusial. Berdasarkan regularitas dari trajektori perubahan Indeks pembangunan Pemuda Indonesia (IPPI) tahun 2015 sampai 2018 dan penerapan persamaan regresi linier bahwa IPPI tahun 2030 hanya berkisar 54,30%. Bahwa proyeksi kualitas IPPI yang masih rendah akan menjadi masalah mengerikan ketika terjadi dalam tahapan kulminasi dari bonus demografis, karena terdapat probabilitas menghadirkan beban ketergantungan yang lebih tinggi dan menjadi anteseden rasional dari kriminalitas, masalah dalam hubungan keluarga bahkan insytan kepercayaan. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan bahwa masalah implementasi kebijakan kepemudaan tersebut dapat ditangani dengan memperkuat jalinan modal sosial sebagai fenomena sosial-politik yang akan dieksplorasi lebih utuh melalui pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. Bahwa hasil penyelidikan dari 25 artikel dan 39 referensilain dengan reputasi kredibel dalam skala internasional menunjukkan bahwa kualitas implementasi kebijakan kepemudaan di daerah Kabupaten Cianjur dalam perspektif behavioralisme akan ditentukan oleh bentuk responsivitas kalangan pemuda terkait kerangka kebijakan sendiri. Di pihak lain, kualitas implementasi kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan dari institusi dalam memberikan *constraints* dan *guidelines* terhadap perilaku implementor kebijakan dalam arena tindakan berbasis kolektivitas sebagai konsensus bersama.

Kata Kunci: Kebijakan, Kepemudaan, Behavioralisme, Neo-Institusionalisme.

1. PENDAHULUAN

Bahwa pelayanan kepemudaan sebagai representasi prima kebijakan distingtif dari Disparpora Kabupaten Cianjur sesuai Perbup No. 63 tahun 2016 menjadi tugas pembantuan, relevan dengan Pasal 11 UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Secara substantif, pemerintah daerah bertanggung jawab merealisasikan kebijakan yang ditetapkan pada skala nasional dengan membentuk konstruksi kebijakan yang jauh lebih relevan dengan varietas variabel di daerah dengan membentuk perangkat daerah sebagai implementor pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 4 UU Kepemudaan secara normatif memang diformulasikan untuk membangun kompetensi dalam menunjang peranan krusial pemuda sebagai agen perubahan, kekuatan moral serta kontrol sosial, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 dan 17. Untuk menunjang peran krusial pemuda tersebut, maka dilakukan rangkaian pelayanan kepemudaan terkait dengan program penyadaran dalam Pasal 22 dan 23, program pemberdayaan dalam ketentuan Pasal 24 dan 25, program pengembangan baik tentang kepemimpinan dalam Pasal 26, kewirausahaan dalam Pasal 27 maupun kepeloporan dalam ketentuan Pasal 29, yang beberapa poin akan

ditindak lanjuti dengan PP. No. 41 tahun 2011, PP No. 60 tahun 2013 serta Perpres No. 66 tahun 2017.

Pelayanan kepemudaan dalam konteks substansi yang jauh lebih terbatas, juga terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 terkait Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-Undang. Bahwa tujuan dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam ketentuan Pasal 5 serta 6 secara implisit menunjukkan probabilitas penyelenggaraan pemberdayaan elemen masyarakat, terutama kalangan pemuda. Melalui ketentuan yang lebih operasional, misalnya Pasal 3 dalam Anggaran Dasar KNPI berdasarkan ketetapan Kongres No. 06/Kongres-XIV/Pemuda-KNPI/2015 berkaitan AD dan ART KNPI bahwa tujuan utama dari KNPI membangun jalinan persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda, membangun kekuatan intelektualitas yang lebih mumpuni sebagai bentuk keahlian profesionalisme dengan pribadi mulia dalam rangka kontinuitas pembangunan serta memberdayakan potensi natural pemuda dalam berbagai bidang. Adapun mengenai fungsi krusial KNPI sesuai ketentuan Pasal 7 adalah berupaya memperkuat jalinan kemajemukan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan sebagai ruang

laboratorium untuk meningkatkan potensi menjadi pemudamandiri, yang relevan dengan konsep pemberdayaan dan pengembangan dalam UU Kepemudaan.

Secara normatif, bahwa pelayanan kepemudaan jugsan terdapat pada sejumlah ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Ketentuan pada Pasal 1 Ayat 4 menunjukkan bahwa pendidikan kepramukaan menjadi sarana cermat dan terukur dalam pembentukan kepribadian, perilaku mulia serta kecakapan hidup melalui pendalaman sejumlah nilai kepramukaan sesuai ketentuan Pasal 8. Melalui ketentuan Pasal 3 disampaikan terkait fungsi krusial gerakan kepramukaan sebagai salah satu bentuk sarana untuk merealisasikan tujuan pramuka dengan pendidikan, pengembangan, pelatihan kepramukaan termasuk kontribusi secara lebih langsung terhadap masyarakat berbasis kontekstualisme dari signifikansi pendidikan. Bentuk pelayanan kepemudaan dalam konteks gerakan kepramukaan diaktualisasikan pada Pasal 4 tentang tujuan untuk mengamalkan nilai Pancasila, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, patuh terhadap hukum, sikap patriotisme, perilaku mulia dan bahkan kepribadian yang koheren dengan rasa keimanan dan ketaqwaan. Bila aturan dalam Pasal 1 Ayat 4 tersebut dikorelasikan dengan Pasal 3 UU Kepemudaan, maka tentu gerakan pramuka menjadi salah satu bentuk upaya mengembangkan potensi natural pemuda secara berimbang dan terus berkelanjutan.

Dalam signifikansi yang lebih terbatas, pelayanan kepemudaan sebagai wujud program pemberdayaan juga diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 12 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ketentuan tersebut, pemberdayaan akan menjadi usaha dalam mengembangkan kemandirian dengan meningkatkan potensi, kompetensi, keterampilan, sikap, pengetahuan bahkan distribusi sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai mitra strategis pemerintahan tingkat desa, sesuai Permensos No. 25 tahun 2019 bahwa Karang Taruna sendiri memiliki tujuan krusial dalam mendorong sinergitas lintas sektordengan berbagai pihak yang dimungkinkan menjalin hubungan koordinasi dan kemitraan, mengembangkan arah semangat kewirausahaan, membangun karakteristik yang unggul, mengembangkan potensi alamiah pemuda dan kesadaran terkait tanggung jawab. Ketentuan Pasal 4 Permensos tersebut, secara substantif relevan dengan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 tentang penyadaran termasuk Pasal 24 dan 25 tentang pemberdayaan dalam UU Kepemudaan.

Sekalipun terdapat konstruksi kebijakan kepemudaan tersebut, secara faktual masalah ketidaksetaraan pemuda di Kabupaten Cianjur masih merupakan cerminan ketidakadilan sosial, tidak ubahnya dengan lapisan atmosfer bumi setelah troposfer. Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

(IPP) di Kabupaten Cianjur dalam bidang pendidikan termasuk kualifikasi rendah dalam skala Provinsi dengan rata-rata lama sekolah berkisar 9,10 tahun bahkan Angka Partisipasi Kasar tidak lebih dari 76,80% (IPPI, 2019). Angka Kesakitan sebagai indikator IPP dalam bidang kesehatan pada tahun 2018 mencapai 9,38% dan proporsi pemuda sebagai perokok aktif menyentuh nilai 31,61% dengan tingkat signifikansi koefisien korelatif di antara kedua variabel tersebut mencapai 49% (IPPI, 2019). Sementara proporsi pengangguran pemuda di Cianjur sebagai indikator IPP dalam bidang kesejahteraan relatif tinggi dengan nilai 23,78%. Namun demikian, masalah pengangguran yang melibatkan generasi muda terjadi di berbagai kawasan dunia di negara Eropa misalnya. Bahwa alasan standard dalam kehidupan telah memberikan beragam pilihan sebagai implikasi rasional dari perubahan sosial, hanya saja pada sisi lain justru mengakibatkan kesenjangan sosial dengan tingkat pengangguran diantara kalangan muda (Knapp dan Waechter, 2021) dan ketergantungan pada orang tua sendiri (Winkler, 2021) yang relatif tinggi.

Keterlibatan pemuda dalam bidang partisipasi dan kepemimpinan sampai saat ini belum terakomodasikan secara prima bahkan konsentrasi spesifik untuk sekedar memperhatikan perilaku birokrasi tidak lebih dari proporsi 10% (Hamirul dan Pratiwi, 2020). Dalam bidang gender dan diskriminasi, anak perempuan berusia 15 tahun yang belum menikah di Kabupaten Cianjur akan memperoleh label "Perawan Tua"(IPPI, 2019). Bahwa proporsi perempuan antara usia 16 sampai 24 tahun yang tengah menjalani masa pendidikan berada dalam posisi paling rendah dalam skala Provinsi dengan berkisar 20,90%, sementara perempuan dengan usia 16 sampai 30 tahun yang memiliki kesempatan bekerja dalam sektoral formal ternyata tidak lebih dari 13,37%. Berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Cianjur, perempuan muda di Amerika Latin dan Meksiko bahkan mempunyai keberanian menjadikan profesi musisi jalanan yang mereka tekuni untuk menunjukkan diskursus feminisme sebagai perlawanan terhadap struktur sosial yang sedari lama telah menghalangi kesetaraan gender (Alcazar, 2019). Terlebih lagi, ketidaksetaraan gender selalu berhubungandengan masalah ketidaksetaraan dalam keterlibatan politik (Smith, 2021), yang juga terjadi secara kontekstual di Italia (Lavizzari dan Portos, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Bahwa metode penelitian yang dipergunakan dalam proses penelitian ini tidak lain adalah *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai pendekatan kredibel dalam proses reduksi berbagai hasil dari penelitian primer dalam skala internasional untuk mengumpulkan sejumlah informasimengenaidiskursus kebijakan dalam perspektif pendekatan behavioralisme serta neo-

institusionalisme. Sekalipun SLR merupakan merupakan kajian yang bersifat sekunder, namun dapat menghadirkan signifikansi konstruktif dengan sintesis berbagai hasil dari penelitian dalam bidang penyelidikan yang relevan, sehingga dapat memperkuat analisis terkait jurang fenomena, tingkat kebaruan dalam penelitian, kedudukan penelitian dalam ontologi PkN, kerangka berpikir, paradigma dimensi konseptual penelitian termasuk desain penelitian yang akan dipergunakan. Bentuk SLR yang dipergunakan adalah pelaporan pilihan item untuk tinjauan sistematik dan meta analisis dengan sejumlah tahap meliputi proses identifikasi kualifikasi terkait kelayakan sumber informasi, mendefinisikan sumberinformasi, menentukan literatur, pengumpulan informasi bahkan pemilihan varietas informasi sebagai subsistem informasi.

Kualifikasi tentang signifikansi kelayakan sumber informasi dalam penelitian ini ditetapkan dengan karakteristik inklusif bahwa berbagai sumber informasi yang dipergunakan merupakan hasil penelitian dari kalangan profesional dan telah memiliki pengalaman panjang untuk penelitian bersangkutan dalam praktik global, bahkan telah tervalidasikandengan penelitian preskriptik sebagai bagian dari proses falsifikasi. Proses definisi sumber informasi dalam penelitian ini ditunjukkan melalui pencarian literatur yang hanya dilakukan pada database dengan repositori mumpuni dengan kredibilitas tinggi seperti *Taylor and Francis Online*, *John Wiley and Sons*, *Springer*, *Sage Publication* dan *Science Direct*. Tahapan untuk menentukan artikel relevan dari *top publisher* tersebut kali pertama dapat dilakukan dengan penetapan sejumlah kata kunci seperti *public policy*, *behavioralism*, *new institutionalism* dan kata kunci lain yang lebih operasional. Penyelidikan signifikansi dan implikasi dari berbagai artikel yang diperoleh akan menentukan apakah artikel tersebut termasuk dalam kualifikasi kelayakan, sehingga artikel yang tidak memenuhi ketentuan akan dieliminasi. Daftar referensi dari sejumlah artikel yang memenuhi kualifikasi untuk selanjutnya, dapat dianalisis lebih lanjut dalam rangka identifikasi artikel lain yang mungkin relevan secara substantif dengan masalah penelitian.

Pengumpulan informasi dilakukan secara prima melalui ekstraksi data berdasar entitas dan namapenerbit artikel, tahun serta topik penelitian, termasuk judul artikel dan kata kunci operasional yang dipergunakan. Adapun tahapan terakhir berkenaan dengan pemilihan variasiitem data sebagai subsistem informasi. Dalam subsistem informasi pendekatan behaviorisme teridentifikasi dua bentuk item data meliputi model *Policy Network Analysis* (PNA) dan *Advocacy Coalition Framework* (ACF), sementara dalam pendekatan neo-institusionalisme ditemukan satu item data yaitu *Institutional Analysis and Development* (IAD) yang akan ditindak lanjuti jauh lebih operasional dengan *Rational Choice Institutionalism*, *Sociological Institutionalism* dan

Historical Institutionalism. Bahwa keseluruhan artikel yang telah didapat dari top publisher baik *Taylor and Francis Online*, *John Wiley and Sons*, *Springer*, *Sage Publication* maupun *Science Direct* mencapai 152 artikel yang akan dikelompokkan berdasarkan judul serta subitem. Artikel yang dieksplorasi dengan parsial mencapai 5 artikel, artikel yang telah dieksplorasi secara holistik mencapai 20 dan yang tidak memenuhi kualifikasi sehingga harus dieliminasi mencapai 128 artikel.

3. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Jurang kesenjangan tajam antara tujuan dari kerangka kebijakan kepemudaan dengan pencapaian hasil kebijakan yang ditandai oleh IPP Kabupaten Cianjur yang termasuk kualifikasi rendah, di masa mendatang akan menjadi masalah yang lebih kompleks. Bahwa proyeksi masalah tersebut dibangun dengan memperhatikan data IPPI empat tahun terakhir tidak mempunyai trajektori perubahan signifikan dengan capaian IPPI tahun 2015 sampai 2018 masing-masing hanya berkisar 48.67, 50.83, 49.33 dan 51.50. Ketika sejumlah pelayanan kepemudaan yang berkorespondensi secara langsung dengan indikator IPP tidak direkonstruksi ulang, maka IPPI antara tahun 2030 - 2040 tidak akan mengalami perubahan mendasar. Dengan menerapkan persamaan regresi linier dan mensintesisikan regularitas trajektori perubahan dalam IPPI tahun 2015 - 2018, maka proyeksi dari IPPI tahun 2030 tidak lebih dari 54.30. Proyeksi IPPI dalam satu dekade mendatang dengan seluruh indikator yang relatif rendah, akan menjadi permasalahan yang lebih mengerikan ketika memasuki masa kulminasi dari bonus demografis. Ketika persentase untuk kelompok usia produktif berkisar 64% dengan IPPI tidak mengalami perubahan mendasar, maka hal tersebut merupakan antededen rasional dari peningkatan rasio angka beban ketergantungan (Muhaemin, 2021), yang menjadi akar masalah tingkat kriminalitas, masalah dalam hubungan keluarga termasuk ingstuan kepercayaan.

Bahwa diametral terbuka sebagai jurang kesenjangan tersebut secara normatif akan merepresentasikan pertanyaan tentang mengapa pelayanan kepemudaan yang terdapat dalam formasi kebijakan kepemudaan dengan berbagai aturan perundang-undangan ketika diselenggarakan pemerintah daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai struktur trajektori keberhasilan yang tidak akan dapat mungkin sama. Secara hipotetik bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu kebijakan akan bergantung secara penuh terhadap konstruksi variabel distingsi yang terdapat pada daerah masing-masing (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015). Misalnya, bahwa IPP Provinsi Jawa Barat tahun 2019 tidak lebih dari nilai 46,17 dan bahkan tidak jauh berbeda dengan pencapaian tahun 2015 dengan kisaran 45,83. IPP

Jawa Barat sendiri tertinggal relatif jauh dibandingkan Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian 70,33 yang pada tahun 2015 hanya berkisar 65,50. Begitu pula dengan IPP di Kabupaten Cianjur dengan seluruh indikator dikualifikasikan ke dalam kategori rendah, berbeda secara diametrik dengan Kota Depok yang menempati urutan kali pertama dalam skala Provinsi. Dengan demikian, diametral terbuka antara berbagai tujuan dari pelayanan kepemudaan dengan pencapaian kebijakan yang berkorelasi dengan indikator IPP terdapat pada permasalahan krusial dalam tahap implementasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur sendiri.

Dalam ontologi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berdasar pada kerangka ontologi PKn dari Winataputra (2001) bahwa pelayanan kepemudaan terdapat pada kajian objek pengembangan sebagai kerangka sosio-psikologis yang berhubungan secara inheren dengan rasa tanggung jawab terlibat terhadap penyelesaian masalah kewarganegaraan, keadaban sosial dan bahkan rasa kebangsaan. Selain itu, melalui ketentuan pada Pasal 7 dari UU Kepemudaan terdapat penegasan bahwa pelayanan kepemudaan dalam kerangka kebijakan kepemudaan diformulasikan secara akurat dalam mengembangkan pelebagaan budaya dalam prestasi, semangat patriotisme dan profesionalisme bahkan secara kontinuitas terlibat dalam pembangunan dalam kehidupan sesuai arah pembangunan dalam skala nasional. Tidak hanya itu, kajian dalam objek telaah PKn dalam konstruksi instrumental seperti ketahanan nasional, keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban, sikap bela negara dan juga wawasan kebangsaan merupakan materi penyelidikan pada program pelayanan kepemudaan dalam konteks penyadaran dan pengembangan sesuai peraturan Pasal 23 dan 24 UU Kepemudaan. Pemecahan masalah terkait dengan diametral terbuka tersebut dalam perspektif PKn dapat diwujudkan dengan memperkuat jalinan modal sosial sebagai norma partisipasi, kepercayaan sosial dan pengetahuan jaringan sosial (Kahne, Chi dan Middaugh, 2006) yang mendorong partisipasi masyarakat (Fahmy, 2006; Kim, 2005; Zhang dan Chia, 2006; Zhong, 2014) dalam pemecahan masalah tentang isu-isu kewarganegaraan yang aktual.

Modal sosial sendiri memang terbentuk melalui interdependensi dan interaksi sosial dalam sebuah masyarakat (Lake dan Huckfeldt, 1998), sehingga PKn sebagai salah satu entitas pendidikan, dapat berperan sebagai akselerator penguatan konsep modal sosial (Algan, Cahuc dan Shileifer, 2013) bahkan prediktor dari keterlibatan politik dan juga sosial (Helliwel dan Putnam, 2007). Secara substantif, modal sosial tidak lain fenomena sosial-politik yang secara lebih operasional dalam korelasi dalam analisis kebijakan publik akan dieksplorasi lebih holistik dengan pendekatan behavioralisme serta neo-institusionalisme. Pendekatan behavioralisme dalam studi pelayanan

kepemudaan akan dipergunakan dalam menganalisis perilaku pemuda di Kabupaten Cianjur sebagai kelompok sasaran kebijakan, Konfigurasi perilaku dari pemuda sebagai responsivitas terhadap kebijakan kepemudaan akan menjadi entitas diskursus penunjang atau penghalang pencapaian kebijakan demikian. Oleh karena itu, kinerja implementasi dari pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur secara hipotetik akan ditentukan oleh konfigurasi responsivitas kelompok sasaran terhadap pelayanan kepemudaan dalam kerangka kebijakan kepemudaan itu sendiri. Bahwa prasangka implisit dan diskriminasi ternyata mampu memberikan implikasi krusial terhadap pelaksanaan kebijakan (Hardin dan Banaji, 2013), sehingga kerangka dari kebijakan harus merepresentasikan motif, keadilan prosedural, identitas, nilai yang berlaku dan motivasi sosial yang dapat berimplikasi konstruktif terhadap perilaku kelompok sasaran.

Dengan berdasarkan pada motivasi perilaku kolektif dalam formasi kebijakan tersebut, implementor kebijakan akan memperoleh berbagai data untuk membentuk perhitungan berkaitan probabilitas keterlibatan kelompok sasaran dalam kebijakan melalui pemetaan karakteristik distingtif perilaku (Tyler, 2013) kelompok sasaran kebijakan yang menjadi target pemerintah. Dalam konteks penyelidikan berkenaan penyelenggaraan layanan kepemudaan bahwa eksistensi dari perasaan diskriminasi dan prasangka implisit menjadi bagian terintegrasi dari responsivitas generasi muda yang harus diantisipasi oleh kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, proses sintesis pendekatan behavioralisme pada kebijakan publik baik dalam tahapan penyusunan, penyelenggaraan maupun penilaian pencapaian hasil kebijakan menjadi krusial dan sangat sentral (Gopalan dan Pirog, 2017). Ketika pendekatan behavioralisme telah menempatkan perilaku sebagai region magnetik dari perubahan dalam masyarakat, maka pendekatan neo-institusionalisme menghadirkan pandangan yang ambivalen dengan dasar tumpuan behavioralisme. Pendekatan neo-institusionalisme memiliki pandangan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh perilaku dari manusia, melainkan oleh regulasi, hukum, aturan, norma sosial sebagai atraktor dari perubahan (Putra dan Sanusi, 2019) bahkan mempengaruhi perilaku manusia secara intensional dalam arena tindakan berbasis kolektivitas.

Pendekatan behavioralisme dalam konteks ilmu pengetahuan sosial yang telah ditindak lanjuti secara operasional melalui bentuk *Social Network Analysis* (SNA), yang dalam analisis kebijakan direkonstruksikan menjadi *Policy Network Analysis* (PNA). Bahwa PNA atau dikenal juga dengan analisis jaringan kebijakan tidak lain merupakan model dialektik dari peran yang akan terdapat dalam jaringan kebijakan dalam setiap pendekatan penjelasan berkait pencapaian suatu kebijakan

(March dan Smith, 2000). PNA akan menjalankan penyelidikan untuk memperoleh pemahaman pengembangan kebijakan dengan memberikan konsentrasi prima terhadap berbagai pihak yang mungkin akan terlibat dalam pembentukan suatu kebijakan (Mikkelsen, 2006). Dengan demikian, menghasilkan analisis kebijakan yang memiliki implikasi konstruktif terhadap pengambilan keputusan berbasis pada tindakan kolektif, maka hubungan inheren di antara aktor dan analisis harus dikendalikan melalui manajemen proses (De Bruijn dan Heuvelhof, 2002). Dalam konteks penyelenggaraan layanan kepemudaan, PNA tentu tidak hanya menyajikan informasi terkait formasi jaringan kebijakan kepemudaan, melainkan juga konfigurasi berbagai pihak dengan seluruh preferensi distingtif yang ada. Secara lebih spesifik, PNA dalam konteks demikian dapat menunjukkan bagaimana kelompok sasaran telah dilibatkan secara inklusif ke dalam jaringan kebijakan (Fawcett dan Daugbjerg, 2012).

Ketika PNA dalam konteks implementasi kebijakan kepemudaan akan secara cermat melakukan penyelidikan terkait kerangka kebijakan dengan berbagai aturan perundangan-undangan, formasi implementor pelayanan kepemudaan, kepentingan dari setiap implementor termasuk bagaimana kalangan pemuda ditempatkan secara inklusif dalam jaringan kebijakan demikian, maka *Advocacy Coalition Framework* (ACF) sebagai pendekatan populer berbasis behaviorisme (Gil-Garcia dkk., 2017) akan memperhatikan bahwa perilaku dan kepercayaan sejumlah pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan merupakan bagian yang integral dengan kebijakan sendiri (Sabatier dan Weible, 2007). ACF merupakan bentuk kerangka kerja dalam tahapan penyusunan suatu kebijakan publik yang secara lebih spesifik diformulasikan untuk menghadirkan pemecahan permasalahan tentang perilaku yang kompleks (Sabatier dan Smith, 1983;1993;1999) dari pihak dalam jaringan kebijakan dengan berbagai kepentingan yang mungkin saling bersimpangan. Bahwa konsentrasi spesifik ACF terdapat dalam penyelidikan keberadaan dari keyakinan dan rekonstruksi kebijakan, ketika cukup sulit untuk melakukan intermediasi kepentingan sejumlah aktor yang masif diperjuangkan terkait tujuan dan model rekonsiliasi perselisihan (Hoppe dan Peterse, 1993).

ACF sendiri sedari tahun 1988 telah diterapkan dalam sejumlah permasalahan dalam berbagai bidang, karena secara empirik dapat menjadi salah satu pendekatan berbasis behaviorisme dalam analisis kebijakan (Schlager, 1995; John, 2003; Schlager dan Blomquist, 1996). Pada umumnya, ACF secara normatif diaplikasikan secara kontekstual dalam permasalahan lingkungan kebijakan dan energi di negara Kanada, Amerika serta sejumlah negara lain di Eropa (Weible dan Sabatier, 2007). Dalam dimensi konsepsionis ACF

sendiri, intermediasi kepentingan yang memuat preferensi setiap kelompok baik media informasi, kelompok kepentingan, berbagai lembaga penelitian maupun setiap jenjang pemerintahan, akan terjadi dalam ruang bernama subsistem kebijakan sebagai arena tindakan bersama dengan berdasarkan batasan dan arahan yang ditentukan dalam aturan yang berlaku. Dalam arena yang penuh intrik dan dinamika tersebut, setiap pihak yang mempunyai entitas preferensidengan abstraksi persamaan karakteristik yang relevan, secara alamiah akan saling berbagai kepercayaan, informasi bahkan sumber daya untuk memperjuangkan nilai yang mereka yakini dapat terakomodasi dalam kebijakan publik yang diambil oleh pemangku kebijakan sebagai pilihan yang paling rasional.

Fungsi krusial dari ACF akan terlihat ketika dalam subsistem kebijakan tidak terdapat pembentukan koalisi dari berbagai pihak, karena setiap kelompok memiliki preferensi yang saling bertentangan secara diametrik dan substantif, sehingga akan menjadi sulit untuk mencapai signifikansi konsensus. Proses intermediasi berbagai kepentingan terjadi diluar subsistem kebijakan, maka ketika intermediasi demikian tidak berhasil melakukan identifikasi berkaitan pemecahan masalah persimpangan keyakinan sebagai preferensi distingtif seluruh kelompok, tentu semua kepentingan yang ada tidak mungkin ditindak lanjuti dalam subsistem kebijakan. Sekalipun hal tersebut hampir tidak pernah terjadi, karena dalam subsistem suatu kebijakan selalu terdapat dua koalisi kepentingan dengan repositori prima. Setiap pihak yang terlibat akan mempunyai kapasitas sumber daya yang berbeda baik terkait dengan teknologi dan informasi, partisipan maupun sumber daya finansial. Oleh karena itu, berbagai pihak dengan sumber daya kurang mempunyai akan mempunyai tendensi signifikan untuk bergantung pada kapasitas sumber daya pihak yang lain dengan membangun koalisi selama kepentingan tertentu masih dapat tercapai.

Permasalahannya adalah ketika setiap pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan mempunyai kapasitas sumber daya yang memadai dengan preferensi nilai yang saling bersimpangan, maka setiap pihak akan menunjukkan resistensi terhadap seluruh transaksi yang akan mempengaruhi konfigurasi dari preferensi yang mereka yakini. Dengan mempertimbangkan kondisi kompleks demikian, dalam pendekatan ACF terdapat bentuk komponen krusial bernama perantara kebijakan sebagai pihak otonom untuk menjembatani jurang persimpangan kepentingan setiap pihak. Tentu hal tersebut dimungkinkan karena perantara kebijakan dapat mempersiapkan aturan main bersama yang relatif diterima oleh setiap kelompok kepentingan dalam rangka pengambilan keputusan berbasis kolektivitas. Berbeda dengan kebijakan delphi yang dapat melakukan identifikasi terhadap probabilitas pemecahan masalah tanpa pelembagaan perantara

kebijakan (Linstones dan Turoff, 2002;Turoff, 2002), maka untuk menjamin kontinuitas subsistem kebijakan tentu keberadaan perantara suatu kebijakan menjadi pilihan yang tidak mungkin lagi untuk dihindari. Dalam konteks tertentu, untuk menjamin keberlangsungan subsistem kebijakan tidak jarang aktivis kebijakan hadir untuk membangun ruang konsensus bersama, sehingga mempunyai samaran kontinum yang tersamar dengan perantara kebijakan.

Di sisi lain, sedari zaman Aristoteles telah terdapat penyelidikan signifikansi dan implikasi terkait eksistensi institusi yang bertumpu pada gagasan bahwa entitas struktur dalam masyarakat akan mempengaruhi konfigurasi serta artikulasi perilaku manusia secara umum. Dalam konteks yang lebih mutakhir, para ahli dalam bidang ilmu politik telah menunjukkan konsentrasi khusus berkaitan dengan peran dari suatu lembaga politik dalam korelasinya dengan perilaku yang lebih sesuai dengan tujuan berbasis keputusan kolektif (Peters, 2012). Tidak dapat dipungkiri keberadaan dari institusi akan memberikan implikasi signifikan terhadap situasi tertentu dan seluruh variabel operasional yang terkait dengan implikasi tersebut (Thelen, 1999). Bahwa eksistensi lembaga politik baik sebagai cerminan kekuatan institusi formal (Senge, 2013) seperti hukum, kebijakan, regulasi serta konstitusi (March dan Olsen, 2005) maupun sebagai kekuatan institusi informal seperti nilai akuntabilitas, transparansi, kesadaran publik dan partisipasi (Sewel, 1992) merupakan konsentrasi khusus dari pendekatan neo-institusionalisme. Dalam kerangkademikian terdapat penyelidikan terhadap varietas variabel yang telah menjadi diskursus penunjang dan penghambat dalam institusi tertentu dalam rangka menghadirkan perubahan.

Oleh karena itu, hakikat terdalam suatu keberadaan institusi akan berbanding lurus dengan tingkat signifikansi institusi bersangkutan dalam mendorong tindakan terukur untuk mencapai implikasi yang ditentukan (March dan Olsen, 1983). Tentu eksistensi dan representasi suatu institusi baik secara formal maupun informal akan memberikan batasan dan arahan yang diberlakukan tanpa terkecuali untuk berbagai kelompok dengan preferensi tertentu (Skocpol, 1996; Laumann dan Knoke, 1987; Di Maggio dan Powell, 1991). Peran krusial dari eksistensi institusi akan menuntun artikulasi dan konfigurasi perilaku bersama dari berbagai kelompok bahkan pilihan pemangku kebijakan berdasarkan pertimbangan rasional, sehingga institusi sendiri dipercaya sebagai sumber dari proses pembentukan kebijakan publik (Peters, 1979). Dalam konteks studi implementasi pelayanan kepemudaan bahwa pendekatan neo-institusionalisme akan bertumpu penuh terhadap analisis kemampuan implementor baik pemerintah desa, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur, Karang Taruna Kabupaten, DPD KNPI maupun Disparpora sebagai birokrat garda terdepan dalam menyelenggarakan rangkaian

pelayanan kepemudaan dan evaluasi kebijakan sesuai dengan dengan prosedur dalam kerangka kebijakan perundang-undangan.

Dalam pendekatan neo-institusionalisme bahwa IPP Kabupaten Cianjur yang masih jauh dari batasan memadai secara hipotetik bersumber pada ketidakmampuan institusi untuk berperan krusial sebagai *guidelines* dan *constraints* terhadap pilihan tindakan dari implementor baik pemerintah tingkat desa, Gerakan Pramuka Kwartir Cianjur, Karang Taruna Kabupaten, DPD KNPI maupun Disparpora sendiri dalam arena tindakan bersama. Pemilihan tindakan dari implementor kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan cerminan kegagalan institusi yang disamakan melalui pembenaran terhadap berbagai variabel sebagai diskursus penghambat dari pencapaian suatu keberhasilan kebijakan seperti masalah kelembagaan (Immergut, 2009), fisibilitas politik (Galston, 2009) dan keterbatasan anggaran (Quiggin, 2009) yang ada. Representasi terukur dari pemilihan tindakan dari implementor kebijakan sebagai bentuk kegagalan institusi akan terlihat jelas dalam implementasi pelayanan kepemudaan yang tidak cukup relevan dengan prosedur dalam kerangka kebijakan kepemudaan dan program pembangunan pemuda dalam praktik global, yang dapat diperburuk dengan evaluasi kebijakan yang tidak memenuhi kualifikasi dalam fase pengujian keabsahan desain evaluasi.

Bahwa kegagalan dari institusi dalam memberikan *guidelines* dan *constraints* terhadap konfigurasi dan artikulasi pemilihan tindakan para implementor kebijakan tersebut dalam pendekatan neo-institusionalisme dapat dieksplorasi dengan holistik melalui *Institutional Analysis and Development* (IAD). Model yang dikenal dengan sebutan analisis perkembangan kelembagaan tersebut dapat memberikan informasi tentang tindakan berbasis kolektivitas yang cukup kompleks melalui pemetaan dan perluasan aksional sebagai bagian dari sistem secara keseluruhan. Untuk dapat menjamin probabilitas tindakan kolektif yang lebih masif, setiap aktor yang terlibat memiliki pilihan tentang beragam tindakan yang secara substantif akan dipengaruhi oleh lingkungan fisik, kondisi ekonomi secara kontekstual dan berbagai pengaturan kelembagaan (Ostrom, 2011; 2015). Tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara perilaku berbagai pihak dan manifestasi kekuatan eksternal dari suatu institusi akan membangun konstruksi arena tindakan, yang akan memberikan jalan analisis lebih akurat mengenai pemetaan probabilitas pemilihan tindakan dari implementor suatu kebijakan. Karena bagaimanapun juga, kebijakan publik merupakan titik kulminasi dari keputusan dalam pemilihan tindakan yang dinilai sebagai ruang bangun prima dari konsensus politis, sehingga salah satu komponen utama dalam IAD akan terkait dengan sumber hukum.

Dalam analisis perkembangan kelembagaan selain atribut hukum sendiri, juga terdapat komponen krusial lain seperti hasil kebijakan, evaluasi kualifikasi tentang hasil kebijakan, jalinan interaksi antara pihak dengan preferensi tertentu, pemilihan tindakan terkait dari konstruksi kebijakan dan sejumlah faktor kontekstual (Ostrom, 2010), yang sebagian komponen secara spesifik akan ditindak lanjuti dengan model pendekatan neo-institusionalisme yang lebih operasional. Dengan model yang lebih distingtif seperti institusionalisme pilihan rasional, institusionalisme sosiologis dan historikal institusionalisme (Clemens dan Cooks, 1999), maka secara mudah dapat diproyeksikan situasi dan latar belakang pemilihan tindakan dari implementor suatu kebijakan yang akan dipengaruhi oleh pengaturan kelembagaan baik secara formal maupun informal. Bahwa penerapan pendekatan neo-institusionalisme secara lebih normatif merupakan alternatif dalam analisis kinerja implementasi suatu kebijakan berbasis preskriptif dengan memperhatikan pemilihan tindakan dalam ruang situasi aksi yang dipengaruhi oleh berbagai variabel kelembagaan. Karena pada umumnya, penyelidikan terhadap kinerja implementasi kebijakan publik selalu bertumpu pada sejumlah variabel konvensional seperti kerangka birokrasi, disposisi, sumber daya dan komunikasi yang menjadikan penelitian tidak lebih dari kajian deskriptik yang secara hipotetik terlalu mudah diproyeksikan.

4. KESIMPULAN

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan bahwa permasalahan tentang diametral tajam di antara tujuan pelayanan kepemudaan dan pencapaian kebijakan yang direpresentasikan dengan IPP Kabupaten Cianjur yang bahkan relatif rendah, dapat ditangani dengan memperkuat jalinan modal sosial antara kelompok sasaran implementor kebijakan kepemudaan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan fungsi krusial sebagai akselerator penguatan modal sosial dan prediktor keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk secara langsung terlibat dalam pemecahan masalah kewarganegaraan, termasuk berkaitan dengan masalah kepemudaan. Modal sosial sebagai pengetahuan mengenai jaringan sosial, kepercayaan sosial sebagai kebijakan dan atribut sosial-budaya bahkan nilai yang memungkinkan terjadinya kerja sama dalam pemecahan masalah merupakan fenomena sosial-politik yang dapat dikaji lebih lanjut dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu behavioralisme dan neo-institusionalisme. Dalam pendekatan yang berbasiskan behavioralisme bahwa kinerja penyelenggaraan kebijakan kepemudaan akan berbanding lurus dengan responsivitas kalangan pemuda di Kabupaten Cianjur sebagai kelompok sasaran kebijakan terhadap kerangka kebijakan kepemudaan itu sendiri. Sementara dalam pendekatan

neo-institusionalisme, bahwa kinerja tentang penyelenggaraan kebijakan kepemudaan akan bertumpu pada kemampuan institusi bersangkutan dalam memberikan pengaturan terhadap pemilihan berbagai tindakan implementor kebijakan baik ragam pelayanan kepemudaan maupun desain evaluasi kebijakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alcazar, M.V. (2019). *Feminism, Youth, and Women Who Rock: Rocking is also a Way to Fight*. Dalam Cuervo H., & Miranda A (Penyunting), *Youth, Inequality and Social Change in the Global South. Perspectives on Children and Young People*, vol 6. Springer, Singapore. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-13-3750-5_7.
- Algan, Y., Cahuc, P., & Shleifer, A. (2013). *Teaching Practices and Social Capital*. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(3), 189–210. doi:10.1257/app.5.3.189.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2019). *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Clemens, E. S., & Cook, J. M. (1999). *Politics and Institutionalism: Explaining Durability and Change*. *Annual Review of Sociology*, 25(1), 441–466. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.441>.
- De Bruijn, H., & Heuvelhof, E. (2002). *Policy Analysis and Decision Making in a Network: How to Improve the Quality of Analysis and the Impact on Decision Making*. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 20(4), 232–242. <https://doi.org/10.3152/147154602781766627>.
- Di Maggio, Paul., & Powell, Walter. (1991). *The New Institutionalism In Organizational Analysis*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Fahmy, E. (2006). *Social Capital and Civic Action*. *Young*, 14(2), 101–118. doi: <https://doi.org/10.1177/1103308806062736>.
- Fawcett, P., & Daugbjerg, C. (2012). *Explaining Governance Outcomes: Epistemology, Network Governance and Policy Network Analysis*. *Political Studies Review*, 10(2), 195–207. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00257.x>.
- Galston, W. A. (2009). *Political Feasibility: Interests and Power*. Dalam Robert E. Goodin, Michael Moran & Martin Rein (Penyunting), *Handbook of Public Policy*. New York: Oxford University.
- Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., & Luna-Reyes, L. F. (2017). *Policy Analytics: Definitions, Components, Methods, and Illustrative Examples*. *Policy Analytics, Modelling, and*

- Informatics, 1–16. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-61762-6_1.
- Gopalan, M., & Pirog, M. A. (2017). Applying Behavioral Insights in Policy Analysis: Recent Trends in the United States. *Policy Studies Journal*, 45(S1), S82–S114. doi: <https://doi.org/10.1111/psj.12202>.
- Hamirul, H., & Pratiwi, W. (2020). *Inovasi dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Pena Persada.
- Hardin, C. D., & Banaji, M. R. (2013). The Nature of Implicit Prejudice: Implications for Personal and Public Policy. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv550cbm.7>.
- Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (2007). Education and Social Capital. *Eastern Economic Journal*, 33(1).
- Hoppe, R., & Peterse, A. (1993). *Handling Frozen Fire*. Boulder, CO: Westview Press.
- Immergut, E. M. (2009). Institutional Constraints on Policy. Dalam Robert E. Goodin, Michael Moran & Martin Rein (Penyunting), *Handbook of Public Policy*. New York: Oxford University.
- John, P. (2003). Is There Life After Policy Streams, Advocacy Coalitions, and Punctuations: Using Evolutionary Theory to Explain Policy Change?. *Policy Studies Journal*, 31(4), 481–498. <https://doi.org/10.1111/1541-0072.00039>.
- Kahne, J., Chi, B., & Middaugh, E. (2006). Building Social Capital for Civic and Political Engagement: The Potential of High-School Civics Courses. *Canadian Journal of Education/Revue Canadienne de L'éducation*, 387-409. doi: <https://doi.org/10.2307/20054169>.
- Kim, J.-Y. (2005). “Bowling Together” isn’t a Cure-All: The Relationship between Social Capital and Political Trust in South Korea. *International Political Science Review*, 26(2), 193–213. doi: <https://doi.org/10.1177/0192512105050381>.
- Knapp, G., & Waechter N. (2021). Social Transformation of Youth and Youth Cultures in Europe: Trends, Theories and the Relevance of Youth Cultural Scenes. Dalam Knapp G., & Krall H (Penyunting), *Youth Cultures in a Globalized World*. Springer, Cham. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-65177-0_3.
- La Due Lake, R., & Huckfeldt, R. (1998). Social Capital, Social Networks, and Political Participation. *Political Psychology*, 19(3), 567–584. doi: <https://doi.org/10.1111/0162-895x.00118>.
- Laumann, O. Edward., & Knoke, David. (1987). *The Organizational States: Social Change in National Policy Domains*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- Lavizzari A., Portos M. (2021). Disclosing Inequalities: Gender and Patterns of Political Participation Among the Italian Youth. Dalam Giugni M., & Grasso M (Penyunting), *Youth and Politics in Times of Increasing Inequalities*. Palgrave Studies in Young People and Politics. Palgrave Macmillan, Cham. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63676-0_4.
- Linstone, Harold A., & Torroff Murray. (2002). *The Delphi Method: Techniques and Applications*. New York: Addison-Wesley.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1983). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. *American Political Science Review*, 78(03), 734–749. <https://doi.org/10.2307/1961840>.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2005). Elaborating the “New Institutionalism”. Dalam R. A. W Rhodes & B. Rockman (Penyunting), *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0008>.
- March, J. G., & Smith, M. (2000). Understanding Policy Networks: Towards a Dialectical Approach. *Political Studies*, 48(1), 4–21. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00247>.
- Mikkelsen, M. (2006). Policy Network Analysis as a Strategic Tool for the Voluntary Sector1. *Policy Studies*, 27(1), 17–26. <https://doi.org/10.1080/01442870500499868>.
- Muhaemin, N. M. (2021). Bonus Demografi Jawa Barat dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat?. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 201-222. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.269>.
- Ostrom, Elinor. (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. *American Economic Review*, 100 (3): 641-72.
- Ostrom, Elinor. (2011). Background on the Institutional Analysis and Development Framework. *Policy Studies Journal*, 39(1), 7–27. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00394.x>.
- Ostrom, Elinor. (2015). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan

- Kepeloporan Pemuda serta serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
- Peraturan Presiden No. 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- Peters, B. Guy. (1979). *Comparative Politics, Theory and Methodology*. *Perspective*, 8(1), 10–13. <https://doi.org/10.1080/00483494.1979.10740463>.
- Peters, B. Guy. (2012). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism* (Third Edition). New York: The Continuum International Publishing Group.
- Purwanto, E. Agus & Sulistyastuti, D. Ratih. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, Fadillah., & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktik*. Depok: Pustaka PL3ES.
- Quiggin, J. (2009). *Economic Constraints on Public Policy*. Dalam Robert E. Goodin, Michael Moran & Martin Rein (Penyunting), *Handbook of Public Policy*. New York: Oxford University.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. (1999). *The Advocacy Coalition Framework: An assessment*. Dalam P. Sabatier (Penyunting), *Theories of the Policy Process*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, Christopher M. (2007). *Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications*. Dalam Paul A. Sabatier (Penyunting), *Theories of the Policy Process*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367274689>.
- Schlager, E. (1995). *Policy Making and Collective Action: Defining Coalitions Within the Advocacy Coalition Framework*. *Policy Sciences*, 28(3), 243–270. <https://doi.org/10.1007/BF01000289>.
- Schlager, E., & Blomquist, W. (1996). *A Comparison of Three Emerging Theories of the Policy Process*. *Political Research Quarterly*, 49(3), 651–672. <https://doi.org/10.1177/106591299604900311>.
- Senge, K. (2013). *The “New Institutionalism” in Organization Theory: Bringing Society and Culture Back In*. *The American Sociologist*, 44(1), 76–95. <https://doi.org/10.1007/s12108-012-9170-5>.
- Sewell, W. H. (1992). *A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation*. *American Journal of Sociology*, 98(1), 1–29. <https://doi.org/10.1086/229967>.
- Skocpol, T. (1996). *Clinton's Health Security Effort and the Turn Against Government in U. S. Politics*. New York: W. W. Norton.
- Smith, K.A. (2021). *An Unequal Surge? UK Youth Participation in Political Organisations and the Role of Gender Inequalities*. Dalam Giugni M., & Grasso M (Penyunting), *Youth and Politics in Times of Increasing Inequalities*. *Palgrave Studies in Young People and Politics*. Palgrave Macmillan, Cham. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63676-0_7.
- Thelen, K. (1999). *Historical Institutionalism in Comparative Politics*. *Annual Review of Political Science*, 2(1), 369-404. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.369>.
- Turroff, Murray. (2002). *The Policy Delphi*. Dalam Harold A. Linstone., & Murray Turoff (Penyunting), *The Delphi Method: Techniques and Applications*. New York: Addison-Wesley.
- Tyler, T. (2013). *The Psychology of Cooperation: Implications for Public Policy*. Dalam E. Shafir (Penyunting), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (pp. 77–90). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv550cbm.10>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2007). *A Guide to the Advocacy Coalition Framework*. Dalam Frank Fischer., Gerald J. Miller., & Mara S. Sidney (Penyunting), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. London: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS*. (Disertasi). Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Diakses dari <http://repository.upi.edu/id/eprint/55891>.
- Winkler, M. (2021). *The Nature of Youth. Or: On the Assumed Disappearance of Youth in the Present Society*. Dalam Knapp G., & Krall H (Penyunting), *Youth Cultures in a Globalized*

- World. Springer, Cham. doi:
https://doi.org/10.1007/978-3-030-65177-0_5.
- Zhang, W., & Chia, S. C. (2006). The Effects of Mass Media Use and Social Capital on Civic and Political Participation. *Communication Studies*, 57(3), 277–297. doi:
<https://doi.org/10.1080/10510970600666974>.
- Zhong, Z.-J. (2014). Civic Engagement Among Educated Chinese youth: The role of SNS (Social Networking Services), Bonding and Bridging Social Capital. *Computers & Education*, (75), 263–273. doi:
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.03.005>.